

**Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023**

**Dilla Andini<sup>1</sup>, Reikha Habibah Yusfi<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Semarang

dillaandini31@students.unnes.ac.id

**ABSTRACT**

*Indonesia is one of the developing countries that cannot be separated from the problem of unemployment, the number of residents who have increased every year has an unfavorable impact if not balanced with quality. The increase in population must be balanced with the quality and ability of each workforce. The average Open Unemployment Rate (TPT) in Indonesia has decreased every year, but the problem of unemployment is still the center of attention. Java Island has a higher population density and is still a favorite place for migrants to find work. West Java Province is among the five provinces with the highest TPT in Indonesia. The purpose of this study is to identify the factors that cause the existing problems and determine the variables that can be used to solve the problem of high unemployment in the districts/cities of West Java Province. This research uses multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that the variables of Economic Growth (PE) and Labor Force Participation Rate (TPAK) have a negative and significant influence on the TPT in the district / city of West Java Province. Simultaneously, the variables of economic growth, TPAK, MSE and HLS affect the TPT in the districts/cities of West Java Province. The coefficient of determination (R2) of this research model is 0.8693 or equivalent to 86.93%. Independent variables consisting of PE, TPAK, MSE, and HLS are able to explain the TPT variable in the district / city of West Java Province by 86.93%. While 13.07% is explained by other variables that are not explained in the study.*

**Keywords:** Unemployment; Economic Growth; TPAK, UMK, HLS; West Java

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak lepas dari permasalahan pengangguran, jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan memberikan dampak yang kurang baik jika tidak diimbangi dengan kualitas. Peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan kualitas dan kemampuan yang dimiliki setiap tenaga kerja. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan akan tetapi masalah pengangguran masih menjadi pusat perhatian. Pulau Jawa memiliki tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan masih menjadi tempat favorit bagi para pendatang untuk mencari kerja. Provinsi Jawa Barat masuk dalam lima provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan yang ada dan mengetahui variabel yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran yang tinggi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Secara simultan variabel Pertumbuhan ekonomi, TPAK ,UMK dan HLS mempengaruhi TPT kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Nilai

koefisien determinan ( $R^2$ ) model penelitian ini sebesar 0,8693 atau setara dengan 86,93%. Variabel independen yang terdiri PE, TPAK, UMK, dan HLS mampu menjelaskan variabel TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat sebesar 86,93%. Sedangkan 13,07% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian.

**Kata kunci:** Pengangguran; Pertumbuhan Ekonomi; TPAK, UMK, HLS; Jawa Barat

## PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara berkembang yang masih menghadapi tantangan dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mampu mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, menjaga kestabilan harga, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, meningkatkan kesempatan kerja penuh dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil didukung oleh beberapa faktor salah satunya penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Hal tersebut sesuai dengan teori klasik Adam Smith bahwa manusia sebagai faktor produksi yang utama dalam menentukan kemakmuran sebuah negara.

Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang harusnya disertai dengan keahlian dan keterampilan. Fenomena tersebut menjadi permasalahan yang di hadapi oleh Indonesia, dengan bertambahnya penduduk mendorong meningkatnya jumlah angkatan kerja, maka dari itu meningkatkan jumlah pencari kerja. Pertumbuhan penduduk harus disertai dengan peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan untuk menyerap penawaran tenaga kerja, demi mencegah bertambahnya tingkat pengangguran.

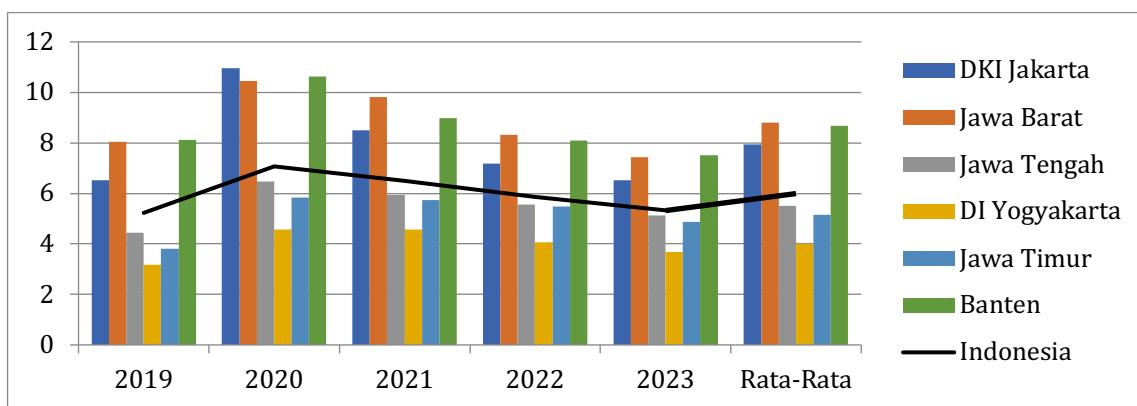
Pengangguran yang tinggi termasuk dalam permasalahan sosial dan ekonomi, permasalahan ekonomi muncul pada saat masyarakat tidak memiliki pekerjaan maka mereka akan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pokok dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi (Rienda, 2020). Pengangguran yang tinggi di anggap permasalahan sosial karena menjadikan penderitaan bagi masyarakat yang sedang menganggur karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menganggur menyebabkan pendapatan berkurang, sehingga mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam sehari-hari. Selain mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan dengan meningkatnya pengangguran dapat meningkatnya angka kriminalitas di daerah tersebut, masyarakat terdorong melakukan kriminalitas karena kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga mereka akan melakukan hal-hal kriminalitas seperti mencuri, perampukan, pembegal dan lain sebagainya (Fachrurrozi et al., 2021).

Tingkat pengangguran di Indonesia setiap tahun rata-rata mengalami penurunan, akan tetapi masalah pengangguran masih menjadi pusat perhatian bagi beberapa provinsi. Terutama di Pulau Jawa karena Pulau Jawa memiliki tingkat penduduk yang semakin bertambah setiap tahun dan masih menjadi tempat favorit

bagi para pendatang untuk mencari kerja. Provinsi yang ada di Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang telah dilakukan Badan Pusat statistik per Agustus pada 5 tahun terakhir 2019-2023 mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat termasuk dalam lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Sedangkan di Pulau Jawa Provinsi Jawa Barat nomor dua dengan tingkat pengangguran tertinggi setelah provinsi Banten. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat melebihi tingkat pengangguran Indonesia, TPT Indonesia per Agustus pada tahun 2023 sebesar 5,32% sedangkan Provinsi Jawa Barat per Agustus pada tahun 2023 TPT sebesar 7,44%.

Pada tahun 2021 provinsi dengan PDRB menurut sektor industri pengolah terbesar adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 42,03% dan kedua Provinsi Jawa Barat sebesar 41,8%. Keberadaan industri pengolahan yang besar ternyata belum bisa berperan dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat Jawa Barat. Tingkat pengangguran di Jawa Barat yang relatif tinggi disebabkan bertambahnya penduduk di daerah perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi arus urbanisasi (migrasi) dari provinsi yang lain, hal tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk secara cepat. Sementara itu ketersediaan lapangan kerja tidak mencukupi. Hal tersebut menjadikan persaingan dengan pendatang untuk mengadu nasib untuk mencari pekerjaan di wilayah Jawa Barat (Lubis, 2017).

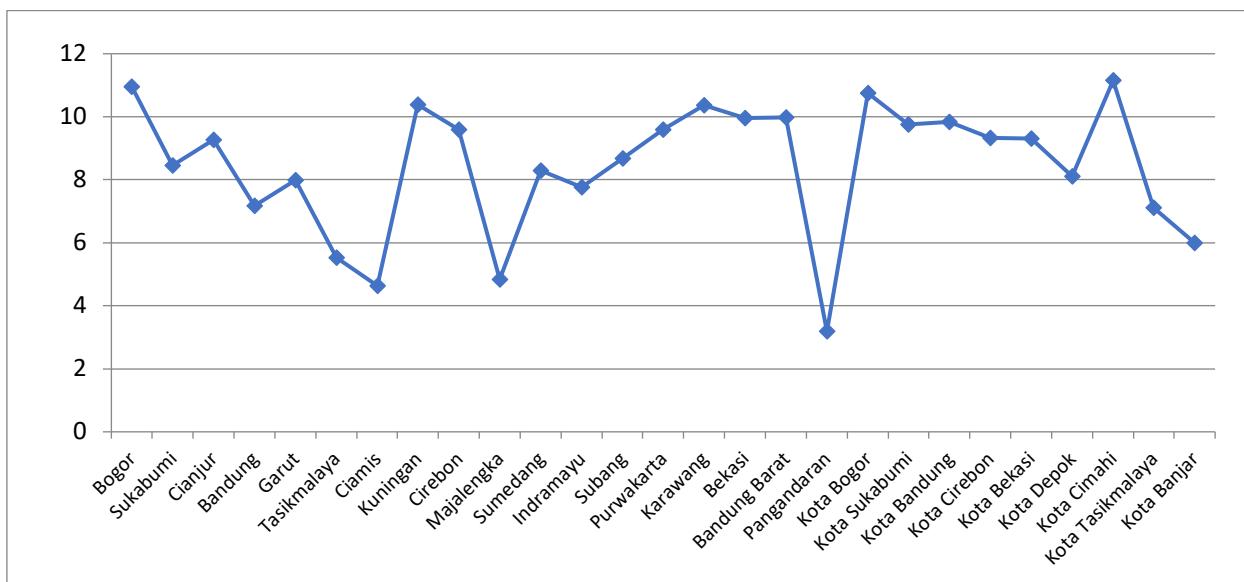


**Gambar 1. TPT Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia 2019-2023**

Sumber: BPS Indonesia (2023)

Rata-rata TPT Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2023 melebihi rata-rata TPT Indonesia. Rata-rata TPT tahun 2019-2023 di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,13%, sedangkan TPT Indonesia sebesar 5,99%. Sumber pengangguran di Provinsi Jawa Barat dirinci berdasarkan tingkat lulusan pendidikan adalah sebagai berikut, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), per Agustus 2023 sebesar 13,42%, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 11,61%, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 6,92%, lulusan Diploma I/II/III sebesar 4,79%, lulusan universitas sebesar

4,77% dan lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah 3,39%. Pengangguran lulusan SMK menjadi yang tertinggi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keahlian lulusan SMK dengan lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No.17 tahun 2010 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan kejuruan untuk menciptakan lulusan yang siap diturunkan ke dunia kerja. Pemerintah telah melakukan program revitalisasi SMK sejak tahun 2016 yang bertujuan untuk menciptakan *link and match* antara sekolah dengan lapangan kerja yang tersedia (Khurniawan, Arie W., Erda, 2019).



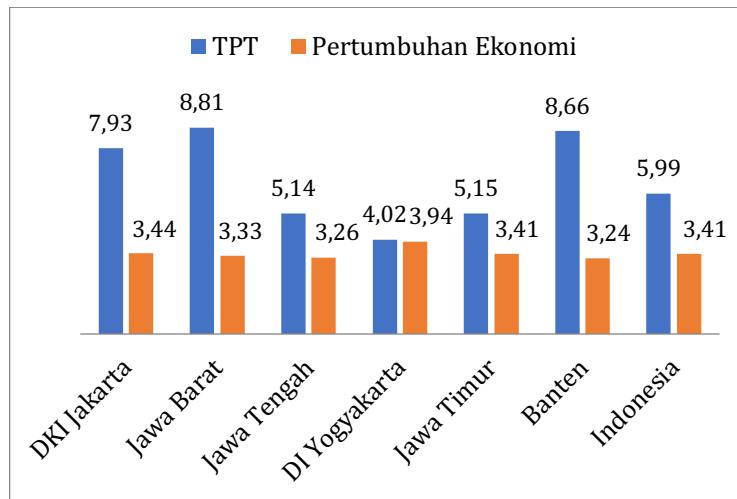
**Gambar 2. Rata-rata TPT kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Jawa Barat(2023)

Rata-rata TPT paling tinggi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 terdapat Kabupaten Bogor sebesar 10,94% dan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Pangandaran 3,18%. Pengangguran yang tinggi dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki perekonomian yang baik dan tingkat produktivitas yang tinggi (Badan Pusat Statistik 2020).

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh perusahaan akan mengalami peningkatan permintaan jasa dan produk. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut perusahaan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain itu dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menciptakan stabilitas ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan akan membuat para investor tertarik melakukan investasi di negara tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tidak selalu diimbangi dengan menurunnya TPT, seperti di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Fenomena tersebut menandakan keadaan pertumbuhan ekonomi terhadap

pengangguran sebagian kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan teori hukum akun yang menjelaskan bahwa ketika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka pengangguran akan mengalami penurunan.



**Gambar 3. Rata-rata TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa**

Sumber: BPS Indonesia (2023)

Rata-rata Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019-2023 provinsi di Pulau Jawa tertinggi terletak pada Provinsi DI Yogyakarta 3,94%, DKI Jakarta 3,44%, Jawa Timur 3,41%, Jawa Barat 3,33%, Jawa Tengah 3,26% dan Banten 3,24%. Meskipun demikian Jawa Barat menduduki pertumbuhan ekonomi nomor empat di Pulau Jawa akan tetapi untuk TPT di Jawa Barat tertinggi di Pulau Jawa, hal tersebut tidak sesuai dengan teori bahwasanya jika pertumbuhan tinggi maka TPT akan rendah. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi seharusnya Provinsi Jawa Barat memiliki TPT yang lebih rendah daripada provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten.

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 paling tinggi di Kabupaten Indramayu sebesar 9,76%, sedangkan pertumbuhan paling rendah Kota Banjar 3,64%. Menurut Diskominfo Indramayu faktor yang menyebabkan Kabupaten Indramayu memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi bisa dilihat dari meningkatnya penanaman modal setiap tahunnya dan dari sektor pangan, produksi gabah kering setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 mampu memproduksi 1,3 juta ton gabah kering giling, kemudian pada tahun 2022 produksi pada mengalami peningkatan menjadi 1,49 juta ton gabah kering. Sementara pada tahun 2023 sampai bulan Agustus mampu memproduksi 900 ribu ton gabah kering giling. Produksi padi Kabupaten Indramayu merupakan jumlah terbesar se-Indonesia. Selain itu Kabupaten Indramayu menjadi daerah penghasil ikan tertinggi di Jawa Barat.

Selain pertumbuhan ekonomi, pengangguran dapat disebabkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah seberapa banyak tenaga kerja yang

tersedia yang siap digunakan untuk proses produksi (Putra & Hidayah, 2023). TPAK merupakan indikator untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi (Badan Pusat Statistik 2023). Rata-rata tahun 2019-2023 TPAK Provinsi Jawa Barat 65,42% nomor tiga setelah DKI Jakarta 63,72% dan Banten 64,02%. Akan tetapi pengangguran di Jawa Barat tertinggi nomor dua di Pulau Jawa. Dalam Teori Lewis menjelaskan meningkatnya TPAK maka pengangguran akan turun. Dengan begitu Pengangguran di Jawa Barat seharusnya lebih rendah daripada DKI Jakarta.

Menurut Teori Lewis kelebihan pasokan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. TPAK dapat digunakan untuk mengetahui tersedianya lapangan pekerjaan di suatu daerah. Apabila TPAK semakin meningkat maka hal ini menandakan bahwa sebagian besar dari penduduk usia kerja, yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi suatu barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Tingginya nilai TPAK akan mengurangi tingkat pengangguran. Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan teori tersebut maka menjadikan sebuah permasalahan. Daerah tersebut di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Pemerintah menetapkan nominal kebijakan upah agar para pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diatur dalam PP No.36 tahun 2021 tentang pengupahan pasal 1 ayat 1. Upah merupakan hak pekerja yang didapatkan tenaga kerja berupa uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Upah tersebut digunakan untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi para pekerja agar keuntungan tidak hanya dirasakan perusahaan akan tetapi para kerja juga merasakan. Alasan pemerintah menetapkan nominal karena peningkatan upah minimum yang melebihi tingkat pasar dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, peningkatan upah dapat menyebabkan pengusaha mengurangi tenaga kerja, sehingga dapat menyebabkan peningkatan TPT. Rata-rata UMP Provinsi Banten dikatakan ditengah-tengah diantara provinsi yang lain yang berada di Pulau Jawa.

Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan harga kebutuhan pangan di daerah tersebut, maka dari itu terjadi perbedaan setiap daerah. UMK tertinggi di Kabupaten Karawang karena pusat perekonomian dan didominasi oleh kawasan industri dan yang paling rendah di Kota Banjar. Aturan tentang UMR kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/kep.776-kesra/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Besarnya upah selalu menyesuaikan tempat

agar terciptanya keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Efek yang paling terasa dari kebijakan penetapan upah minimum adalah tingkat upah yang semakin tinggi karena perusahaan harus menaati kebijakan pemerintah. Sehingga perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. UMK Kabupaten /kota Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi tidak diimbangi dengan penurunan pengangguran. hal tersebut tidak sesuai dengan teori A.W. Philips (Kurva Philips) yang menyatakan bahwa upah atau inflasi memiliki hubungan terbalik dengan pengangguran.

Penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari SDM yang kompeten. SDM yang kompeten dapat diperoleh salah satunya dari sektor pendidikan. Dalam penelitian ini sektor pendidikan diukur menggunakan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Selain untuk mengukur pendidikan HLS merupakan indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HLS adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada usia dimasa mendatang (Siskawati & Zulfhi Surya, 2021).

HLS kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan berbeda dengan TPT yang masih cukup fluktuatif, akan tetapi tingkat HLS antar kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat masih terdapat ketimpangan. HLS tertinggi terletak pada Kabupaten Ciamis dengan rata-rata 14 tahun. dan terendah Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang dengan rata-rata 11 tahun. Perbedaan angka HLS setiap Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun yang masih renah, sebenarnya anak diharapkan masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah atas (SMK/SMA/MA) tetapi pada kenyataannya tidak. Meskipun demikian angka HLS di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan sesuatu yang baik hanya saja membutuhkan kebijakan pemerintah yang membuat angka HLS setiap kabupaten/kota memiliki rata-rata tahun yang sama.

Angka HLS yang terus naik setiap tahunnya memiliki dampak baik dalam mengurangi angka pengangguran di Jawa Barat. Dalam teori *human capital* IPM dengan pengangguran memiliki pengaruh negatif yang artinya apabila IPM naik maka pengangguran akan turun. Penelitian ini menggunakan HLS untuk mempresentasikan IPM suatu wilayah. Kondisi yang terjadi pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan teori *human capital* kenaikan angka HLS naik setiap tahunnya di kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat tetapi tidak diimbangi dengan penurunan angka pengangguran seperti di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan yang ada dan mengetahui variabel yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran yang tinggi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mengetahui hubungan dari beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja ,upah minimum kabupaten/kota dan harapan lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Data yang digunakan data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* tahun 2019-2023 dan yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan data *cross section* adalah data penelitian yang diperoleh dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 135 sampel. Yaitu data tahunan dari tahun 2009-2023 pada 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini Eviews .

Berikut permasalahan model dalam penelitian ini

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 HLS_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

- TP : Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)  
PE : Pertumbuhan Ekonomi (persen)  
TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)  
UMK : Upah Minimum Kabupaten/kota (rupiah)  
HLS : Harapan Lama Sekolah (tahun)  
 $\beta_0$  : Konstan  
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ : Koefisien Regresi Berganda  
e : Variabel selain yang di teliti  
i : *Cross-section*  
t : *Time series*

persamaan 1 ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma untuk mendapatkan persamaan yang linier. Setelah diubah dalam bentuk log maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 \log UMK_{it} + \beta_4 \log HLS_{it} + e_{it}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data panel menggunakan beberapa tahapan yang digunakan dalam analisis data panel, yang pertama melakukan pemilihan model terbaik, terdapat tiga uji yang dilakukan yang pertama uji Chow, dilakukan dengan tujuan untuk memilih model yang paling baik antara *Common Effects Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Setelah Uji Chow dilakukan apabila nilai *F-Prob Cross-section* < 0,05, maka model yang akan digunakan adalah FEM. Uji yang kedua adalah Uji Hausman yang

dilakukan dengan tujuan memilih model antara *Random Effect Model* (REM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai probabilitas *Chi -Square*  $<0,05$  maka model yang dipilih adalah FEM, jika nilai probabilitas *chi-square*  $>0,05$  model yang dipilih adalah REM. Uji yang ketiga uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji ini dilakukan untuk memilih model CEM atau REM. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka yang terpilih adalah REM, namun jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model yang dipilih adalah CEM (Riya A.N.D, Ismail A.W, 2024).

### **Uji Spesifikasi Model Regresi**

#### **1. Uji Chow**

**Tabel 1. Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	df	Prob.
Cross-section F	9.901064	(26,104)	0.0000
Cross-section Chi-Square	168.165592	26	0.0000

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan hasil dari Uji Chow dimana pada Uji Chow diperoleh nilai *cross-section F* sebesar 9,901064 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Berdasarkan Uji Chow di atas nilai probabilitas yang diperoleh menunjukkan angka lebih kecil 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), maka hasil Uji Chow menandakan bahwa model yang terpilih model FEM. Langkah selanjutnya melakukan Uji Hausman

#### **2. Uji Hausman**

**Tabel 2. Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-sq. df	Prob.
Cross-section random	15.372845	4	0.0040

Sumber: Data diolah, 2025

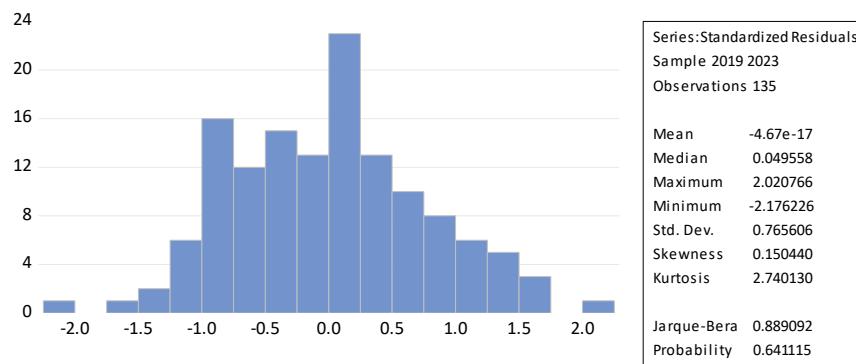
Tabel 2 menunjukkan hasil dari Uji Hausman dimana nilai probabilitas *cross-section* menunjukkan angka sebesar 0,0040 dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha= 5\%$ ). Maka dapat ditarik kesimpulan model yang terpilih dalam Uji Hausman adalah model FEM. Dikarena pada saat Uji Chow dan Uji Hausman yang terpilih FEM maka tidak perlu dilakukan uji *Lagrange Multiplier*.

### **Uji Asumsi Klasik**

Setelah ditemukan model terbaik yang digunakan dalam penelitian maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Tujuan dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah model regresi yang digunakan memiliki ketepatan dalam estimasi, konsisten dan tidak bias. Dalam uji ini terdapat 4 tahapan yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu tahapan dalam uji asumsi klasik yang memiliki fungsi untuk melihat atau menguji apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal ketika nilai probabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari tingkat signifikan, adapun untuk nilai signifikan sebesar  $\alpha=5\%$ .



**Gambar 4. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Data diolah, 2025

Pada gambar 4 terdapat nilai probabilitas *Jarque-Bare* sebesar 0,641115. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih dari 0,05 yang artinya data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas selanjutnya dilakukan uji multikolinieritas.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel bebas dalam sebuah model regresi. Indikasi terdapat masalah multikolinieritas adalah ketika nilai koefisien korelasi di atas 0,80 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model.

**Tabel 3. Hasil Multikolinieritas**

	PE	TPAK	UMK	HLS
PE	1	0.111250	-0.015393	0.043236
TPAK	0.111250	1	-0.297266	-0.156184
LOGUMK	-0.015393	-0.297266	1	0.224241
LOGHLS	0.043236	-0.156184	0.224241	1

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3 dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan linier antara variabel bebas dalam penelitian ini, dikarenakan nilai koefisien korelasi tidak ada yang melebihi 0,80 sehingga dapat disimpulkan data terbebas dari asumsi multikolinieritas.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah model mempunyai perbedaan varian antara residual setiap masing-masing pengamatan. Pada penelitian ini menggunakan uji *Breush-Pagan-Godfrey* untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas pada model penelitian ini. Syarat agar uji heteroskedastisitas terpenuhi apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05.

**Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas**

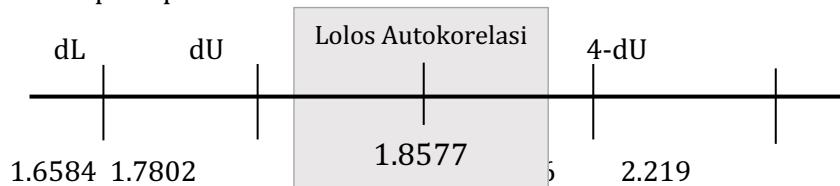
Dependent Variabel : ABS(RESID)	Prob
Variabel	
C	0.7139
Pertumbuhan Ekonomi	0.1212
TPAK	0.3064
UMK	0.2774
HLS	0.8425

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil Uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, TPAK, UMK dan HLS memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05 yang artinya uji heterokedastisitas sudah terpenuhi atau dapat dilakukan uji selanjutnya karena tidak ada masalah heterokedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antar residual observasi. Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Waston dalam mendeteksi masalah autokorelasi pada penelitian ini



**Gambar 5. Hasil Autokorelasi**

Sumber: Data diolah, 2025

Dari uji yang telah dilakukan, nilai uji Durbin-Waston (DW) lebih besar dari batas bawah ( $d_L$ ) dan batas atas ( $d_U$ ), nilai DW juga lebih kecil dari  $4-d_L$  dan  $4-d_U$ . Berdasarkan hasil uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi penelitian ini.

### Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk melihat apakah model sudah dapat dikatakan signifikan atau tidak. Menurut Gujarati (2013) uji statistik merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian. Terdapat tiga jenis uji

statistik yaitu koefisien determinan uji signifikan individual (T) dan uji signifikan bersama-sama (uji F).

### 1. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi atau juga dikenal dengan *R-Squared* adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Ketika hasil uji mendekati angka satu maka dapat dikatakan variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, namun ketika hasil uji mendekati angka nol dapat dikatakan banyak variabel di luar model yang berpengaruh.

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinan**

<i>R-Squared</i>	0.898631
<i>Adjusted R-squared</i>	0.869390

Sumber: Data diolah, 2025

Koefisien determinan ( $R^2$ ) pada penelitian ini sebesar 0,869390 atau setara dengan 86,93%. Yang artinya nilai koefisien determinan tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri PE, TPAK, UMK, dan HLS mampu menjelaskan variabel TPT di kab/kota Provinsi Jawa Barat sebesar 86,93%. Sedangkan 13,07% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian.

### 2. Uji t (Uji statistik secara parsial)

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh individual suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Cara melihat hasil uji t-statistik dengan melihat nilai probabilitas tiap variabel independen. Selain melihat nilai probabilitas dapat dilakukan pembandingan antara t-statistik dengan t-tabel. Variabel independen dapat dikatakan signifikan ketika nilai probabilitas lebih kecil dari taraf nyata yaitu 0,05 ( $\alpha= 5\%$ ).

**Tabel 6. Hasil Uji t parsial**

Variabel	T Hitung	< atau >	T Tabel	Nilai Signifikan
PE (X1)	-10.68298	<	1.97838	0.0000 (Signifikan)
TPAK (X2)	-3.132081	<	1.97838	0.0023 (Signifikan)
UMK (X3)	0.195186	<	1.97838	0.8456 (Tidak Signifikan)
HLS (X4)	-1.907808	<	1.97838	0.0592 (Tidak Signifikan)

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 yang memberikan hasil dari uji t-statistik menjelaskan bahwa secara parsial terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan

terhadap TPT. Variabel pertumbuhan ekonomi dan TPAK berpengaruh signifikan terhadap TPT karena nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) selanjutnya variabel UMK dan HLS tidak signifikan terhadap TPT dikarenakan nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).

### 3. Uji F

Uji F atau juga dikenal dengan uji f-statistik adalah uji yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara menyeluruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F-statistik bisa dilakukan dengan melihat nilai F-Statistik atau juga bisa melihat nilai probabilitas F-statistik. Ketika nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 7. Hasil Uji F**

F-Statistic	30.73183
Prob (F-statistic)	0.00000

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel hasil dari uji F-statistik dimana nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0000 maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Karena nilai probabilitas uji F-statistik pada uji ini lebih kecil dari 0,05.

### Model Regresi Data Panel

Analisis regresi pada penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, TPAK, UMK dan HLS terhadap TPT kabupaten/kota provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2019-2023 dengan menggunakan analisis regresi data panel. Penelitian ini model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), hasil estimasi penggunaan metode FEM pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Regresi Model FEM**

Variabel Dependent : TPT	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
Variabel				
C	111.9923	43.86325	2.553214	0.0121
PE	-0.302897	0.028353	-10.68298	0.0000
TPAK	-0.137922	0.044035	-3.132081	0.0023
LOGUMK	0.266975	1.367800	0.195186	0.8456
LOGHLS	-38.18948	20.01747	-1.907808	0.0592
F-Statistic				30.73183
Prob-F				0.00000
(statistic)				0.898631

R-squared	0.869390
Adjust R-squared	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan hasil estimasi dari FEM, selain itu diperoleh juga nilai koefisien regresi setiap variabel penelitian yaitu sebagai berikut.

$$TPT = 111,9922 - 0,30289PE - 0,13792TPAK + 0,26697UMK - 38,18948HLS + e_{it}$$

Penjelasan hasil estimasi persamaan pada tabel 5 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar -0,30289 dengan nilai probabilitas 0,0000. nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan nilai koefisien tersebut dapat diambil kesimpulan ketika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% maka akan menurunkan TPT sebesar 0,30289% dengan asumsi *ceteris paribus*.
2. TPAK memiliki nilai koefisien sebesar -0,13792 dengan nilai probabilitas 0,0023. nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan nilai koefisien tersebut dapat diambil kesimpulan ketika terjadi kenaikan TPAK 1% maka akan menaikkan TPT sebesar 0,13792% dengan asumsi *ceteris paribus*.
3. UMK memiliki nilai koefisien sebesar 0,26697 dengan nilai probabilitas 0,8456 nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan nilai koefisien tersebut dapat diambil kesimpulan ketika terjadi kenaikan UMK 1% maka akan menaikkan TPT sebesar 0,2669% dengan asumsi *ceteris paribus*.
4. HLS memiliki nilai koefisien sebesar -38,18948 dengan nilai probabilitas 0,0592 nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan nilai koefisien tersebut dapat diambil kesimpulan ketika terjadi kenaikan HLS 1% maka akan menurunkan TPT sebesar 38,18948% dengan asumsi *ceteris paribus*.

### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2019-2023. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini sebesar -0,0300289 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000<0,05. dari hasil koefisien dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% menyebabkan turunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,30289% dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat dikaitkan bahwa pada penelitian ini peningkatan pertumbuhan ekonomi membantu dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Hukum Okun yang dikemukakan oleh ekonom Arthur Okun, menjelaskan bahwa terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka pengangguran akan mengalami penurunan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka roda perekonomian yang mengerakkan juga semakin meningkat dan *output* yang dihasilkan akan meningkat, untuk meningkatkan *output* yang tinggi tentunya membutuhkan tenaga kerja yang semakin bertambah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Joko Susanto, 2019) pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif terhadap pengangguran terbuka kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. dan sejalan dengan penelitian (Hjazeen et al., 2021) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan pengangguran.

### **Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel TPAK pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2019-2023. Nilai koefisien variabel TPAK pada penelitian ini sebesar -0,137922 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0023 < 0,05$ . dari hasil koefisien dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadi peningkatan TPAK 1% menyebabkan turunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,137922 dengan asumsi *ceteris paribus*. Maka dapat dikaitkan pada penelitian ini peningkatan TPAK dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Lewis yang menjelaskan pada saat kelebihan pasokan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain, melalui TPAK dapat digunakan untuk mengetahui tersedianya lapangan pekerjaan di suatu daerah. Apabila TPAK semakin meningkat maka hal ini menandakan bahwa sebagian besar dari penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi suatu barang maupun jasa, dalam kurun waktu tertentu dalam artinya dengan tingginya nilai TPAK akan mengurangi tingkat pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sutranggono et al., 2023) yang menjelaskan bahwa TPAK berpengaruh negatif, ketika TPAK menurun maka jumlah pengangguran akan meningkat sehingga dapat menyebabkan penurunan produktivitas perekonomian. Masalah lainnya adalah semakin sedikit orang yang bekerja maka produk barang dan jasa yang dihasilkan akan sedikit hal tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian sejalan dengan penelitian (Septiyanto & Tusianti, 2020) menjelaskan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran provinsi Jawa Barat dan bertanda negatif. Yang artinya apabila TPAK mengalami peningkatan maka akan membantu menurunkan pengangguran.

**Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel UMK memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap TPT di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2019-2023. Nilai koefisien variabel UMK pada penelitian ini sebesar 1.367800 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.8456 > 0.05$ . dari hasil koefisien dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadi peningkatan UMK 1% menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 1.367800% dengan asumsi *ceteris paribus*. Akan tetapi hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel UMK tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran terbuka. Artinya berapa pun UMK yang ditetapkan pemerintah tidak mempengaruhi jumlah pengangguran yang ada di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat. Karena berapa pun jumlah UMK jika masyarakat membutuhkan uang pasti akan tetap bekerja atau mencari pekerjaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Zuliasari & Rachmawati, 2021) yang menjelaskan bahwa kenaikan upah secara tidak langsung akan meningkatkan kesempatan kerja , semakin tinggi upah yang ditetapkan semakin tinggi pula tingkat pengangguran di negara tersebut. Provinsi Jawa barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki upah tertinggi di Pulau Jawa dibandingkan dengan provinsi lain, namun tingkat pengangguran di Jawa Barat juga tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan kurva Philips yang dikemukakan oleh A.W Philips, yang menjelaskan korelasi negatif antara upah dengan tingkat pengangguran. Pengangguran disebabkan oleh kekuatan upah akibat penyesuaian jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Namun adanya kenaikan tingkat upah akan menyebabkan meningkatnya penawaran tenaga kerja atau pengangguran. Hal ini mengakibatkan permintaan tenaga kerja berkurang dan terjadi surplus tenaga kerja atau pengangguran. Dan penelitian (Anisa Fatmawati, 2024) yang menjelaskan bahwa upah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

**Pengaruh Harapan Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel HLS pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPT di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2019-2023. Nilai koefisien variabel HLS pada penelitian ini sebesar -38,18948 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0592 > 0,05$ . dari hasil koefisien dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadi peningkatan HLS 1% menyebabkan turunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 38,18948% dengan asumsi *ceteris paribus*. Akan tetapi hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel HLS tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran terbuka. Artinya berapa tahun HLS tidak mempengaruhi jumlah pengangguran yang ada di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Siskawati & Zulfhi Surya, 2021) menunjukkan bahwa harapan lama sekolah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. HLS hanya dapat mengukur berapa lama seseorang akan menempuh pendidikan di masa yang akan datang dan HLS hanya menjelaskan kuantitas pendidikan bukan kualitas, jika kualitas pendidikan rendah maka tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Dan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *human capital* bahwasanya HLS merupakan indikator perhitungan IPM dalam teori *human capital* jika HLS yang tinggi pengangguran akan rendah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis telah diuraikan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, TPAK, UMK dan HLS terhadap TPT kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun simultan selama tahun 2019-2023 untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap TPT kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur aktivitas ekonomi dinegara tersebut. pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka di harapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.
2. TPAK memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap TPT kabupaten/kota provinsi Jawa Barat. Adanya peningkatan angkatan kerja menyebabkan perusahaan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja dan upah yang ditawarkan semakin rendah. Hal ini menimbulkan kelebihan penawaran pekerjaan sehingga para pekerja berlomba-lomba dapat mendapatkan pekerjaan.
3. UMK tidak memiliki pengaruh terhadap TPT kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Tingginya upah minimum di suatu wilayah akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja dengan melakukan PHK, dengan demikian akan mengakibatkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi jika masyarakat membutuhkan uang maka masyarakat tidak melihat berapa upah yang akan diberikan.
4. HLS tidak memiliki pengaruh terhadap TPT kabupaten/kota provinsi Jawa Barat. Karena variabel HLS hanya mengukur seberapa lama seseorang dapat menempuh pendidikan hanya kuantitas bukan kualitas. Sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.

Dari variabel yang diteliti hanya terdapat 2 variabel yang memiliki pengaruh terhadap TPT kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat yaitu variabel Pertumbuhan ekonomi dan TPAK.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terdapat saran yang di ajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat memiliki dampak yang baik bagi tingkat pengangguran. Diharapkan pemerintah tetap memiliki target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunya di setiap kabupaten/kota provinsi Jawa Barat. Dan dilakukan pertumbuhan ekonomi yang merata di setiap daerah.
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Diharapkan supaya pemerintah dapat meningkatkan angka TPAK dengan kualitas yang baik setiap tahunya dan memperbanyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Agar masyarakat yang terserap dalam dunia kerja akan lebih banyak.
3. Upah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Meskipun tidak memiliki pengaruh diharapkan supaya pemerintah tetap menetapkan upah sesuai dengan harga kebutuhan pangan sekitar. Agar masyarakat yang mendapatkan upah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Harapan lama sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Jawa Barat, maka perlu di lakukan kajian yang mendalam terkait dengan kesesuaian harapan lama sekolah dengan kenyataan lama sekolah yang ditempuh oleh masyarakat. Selain itu supaya lebih disiapkan lagi ketrampilan pada waktu sekolah dengan kebutuhan di dunia kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus tahun 2019-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi tahun 2019-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2023). *Harapan lama sekolah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023*. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2023). *Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023*. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2023). *Tingkat partisipasi angkatan kerja*

*kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.* Bandung: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2023). *Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.* Bandung: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2023). *Upah minimum kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.* Bandung: Badan Pusat Statistik.

Diskominfo Indramayu. (2023). *HUT Ke-496 Kabupaten Indramayu.* Diakses dari <https://indramayukab.go.id/hut-ke-496-kabupaten-indramayu/> pada 7 Februari 2025.

Fachrurrozi, K., Fahmiwati, F., Hakim, L., & Lidiana, A. (2021). Pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia di tahun 2019. *Jurnal Real Riset*, 3(2), 172–178. <https://doi.org/10.47647/jrr>

Fatmawati, A. (2024). Analisis determinan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 4(2), 7515–7525. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i2.40>

Gubernur Jawa Barat. (2022). *Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/kep.776-kesra/2022 tentang upah minimum kabupaten/kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023.*

Gujarati, N. D., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar ekonometrika* (Buku 1 dan 2, Edisi ke-5, R. C. Mangunsong, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.

Hjazeen, H., Seraj, M., & Ozdeser, H. (2021). The nexus between economic growth and unemployment in Jordan. *Future Business Journal*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s43093-021-00088-3>

Khurniawan, A. W., & Erda, G. (2019). Pendidikan ketarunaan SMK: Solusi alternatif pembentukan karakter siswa SMK berbasis khasanah Nusantara. *Distribution*, January, 1–23. <http://clastap.pbworks.com/f/SkillSoft+-+Blended+Elearning.pdf>

Lubis, D. S. (2017). Analisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(2), 180. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v3i2.1356>

Putra, G. V. H., & Hidayah, N. (2023). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, dan produk domestik regional bruto terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 149–158. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23731>

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Sekretariat JDIH BPK, Jakarta.

- Rianda, C. N. (2020). Analisis dampak pengangguran terhadap individu. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.358>
- Riya, A. N. D., Ismail, A. W., & H. L. (2024). Pengaruh kualitas pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 7(1), 26–36. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS/article/view/773/582>
- Sari, Y. P. (2023). *Teori makroekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Septiyanto, W. G., & Tusianti, E. (2020). Analisis spasial tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(2), 119–131. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i2.40>
- Siskawati, N., & Zulfhi Surya, R. (2021). Pengaruh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Riau. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 7(3), 173–177. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v7i3.231>
- Susanto, J. (2019). Determinan tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1–17. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/view/3689>
- Sutranggono, D., Sujianto, A. E., Safitri, E. N., Prastiwi, N. I., Ayumzah, T., & Isnaini, V. Y. (2023). Pengaruh kesehatan dan pengangguran terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Jawa Timur periode 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen Indonesia*, 2(2), 24–311. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Zuliasari, S., & Rachmawati, L. (2021). Analisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, upah minimum terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 105–119. <https://doi.org/10.26740/independent.v1n1.p105-119>